

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

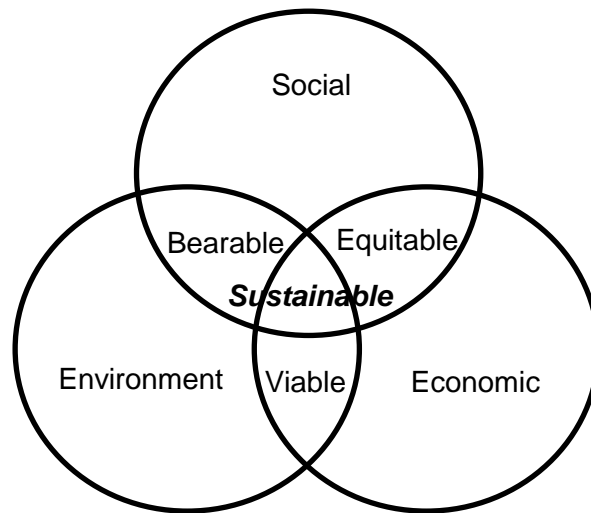
Sejarah pembangunan berkelanjutan diawali dari *Conference on the Human Environment* (Konferensi mengenai lingkungan manusia) yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tahun 1972 di Stockholm. Dalam konferensi yang dihadiri oleh delegasi negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa perlu adanya pertimbangan masalah lingkungan dalam program-program pembangunan yang selama ini dijalankan.

Berangkat dari konferensi di Stockholm, PBB melalui *World Conference on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 mempublikasikan sebuah laporan yang berjudul *our common future* atau *Brundtland report* yang didalamnya memuat mengenai konsep pembangunan yang berkelanjutan. Menurut laporan tersebut pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sejak dipublikasikan oleh WCED mulai banyak para ahli dari berbagai disiplin ilmu mendefinisikan mengenai pembangunan berkelanjutan. Tidak berhenti sampai di pertemuan WCED, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan dilanjutkan dengan *United Nations' Earth Summit* atau Konferensi Bumi PBB pada tahun 1992 di Rio Janerio yang menghasilkan Agenda 21 dan disambung dengan pertemuan di Johannesburg yang dilaksanakan Majelis Umum PBB yang mengadopsi *Millenium Development Goals* pada tahun 2000 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia pada tahun 2002 (Todoror dan Marinova, 2011). Dari berbagai pertemuan yang diadakan menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Dari berbagai definisi pembangunan berkelanjutan yang ada, dapat diintisarikan bahwa pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk pencapaian tidak hanya keberlanjutan bidang ekologi/lingkungan akan tetapi keberlanjutan dibidang ekonomi dan sosial. Model pembangunan berkelanjutan sesuai yang

disampaikan oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) dalam Todoror dan Marinova (2011) seperti tersaji dalam Gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1. 1. Model Pembangunan Berkelanjutan

Model pembangunan berkelanjutan seperti disebutkan pada Gambar 1.1 dapat diuraikan sebagai berikut, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Untuk di Indonesia, pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sudah mulai merambah dan dijadikan acuan pembangunan di segala bidang. Salah satu contohnya adalah pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui konsep *blue economy*. Sebagaimana kita ketahui bersama sebagai sebuah negara kepulauan Indonesia memiliki potensi wilayah perairan laut dan perairan umum daratan yang begitu melimpah. Menurut data Kelautan dan Perikanan

Dalam Angka Tahun 2011, luas lautan Indonesia seluas 3. 544.743,9 km², yang terdiri dari laut teritorial seluas 2.884.210,90 km², Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.981.211 km², dan luas laut 12 mil seluas 279.322 km² di tambah dengan panjang garis pantai sepanjang 104.000 km (KKP,2011). Angka–angka tersebut menunjukkan potensi perikanan laut yang dimiliki Indonesia. Untuk perikanan perairan umum daratan potensi yang dimiliki seluas 158.125 ha . Bahkan untuk sektor kelautan dan perikanan menyumbang 6,48% PDB Nasional melebihi sektor pertanian yang hanya sebesar 3,42%.

Kebijakan industrialisasi perikanan berbasis *blue economy*/ekonomi biru merupakan salah satu strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengelola potensi yang begitu melimpah tersebut. Pendekatan ekonomi biru yang dipergunakan oleh KKP dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan berprinsip pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Unsur keberlanjutan didalam ekonomi biru terlihat dari pijakan yang dipakai yakni logika ekosistem. Logika ekosistem bekerja tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kata kunci dalam ekonomi biru terletak pada efisiensi penggunaan sumberdaya alam, nirlimbah dan prolingkungan.

Menurut Pauly (2009) ekonomi biru dilihat dari prespektif lingkungan adalah sebuah proses yang nirlimbah. Proses ini merupakan sebuah solusi untuk mengatasi masalah pencemaran pada tingkat regional maupun global. Dari sudut pandang industri, ekonomi biru berarti memperbesar daya saing dengan penggunaan sumberdaya yang lebih efisien. Dari sudut pandang pemerintah, ekonomi biru berarti penggunaan berbagai macam bahan mentah untuk menciptakan industri baru, menciptakan lapangan pekerjaan serta peningkatan produktifitas. Selain itu pendekatan ekonomi biru ditujukan pada penyediaan sarana prasarna untuk pemenuhan pangan, sandang, dan papan saat ini tanpa merusak generasi masa depan untuk melakukan hal sama.

Beberapa prinsip pokok pemikiran terkait konsep ekonomi biru, setidaknya mengacu pada efisiensi sumber daya, nirlimbah (*zero waste*), pemerataan sosial dan kesempatan kerja bagi orang miskin, inovasi dan adaptasi serta efek ekonomi pengganda.

Senada dengan Pauly, Nasir (2012) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pelaksanaan konsep *blue economy* seharusnya memenuhi prinsip terintegrasi, berbasis kawasan, sistem produksi bersih, dan

investasi kreatif serta inovatif. Pembangunan berbasis kawasan salah satu contohnya adalah pengembangan kawasan minapolitan. Tentunya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial daerah pengembangan kawasan sehingga dapat mendukung konsep pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang seperti tersebut dalam masterplan minapolitan Kabupaten Magelang didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor: PER.12/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Minapolitan, Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.32/MEN/2010 pada tanggal 14 Mei 2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana telah dirubah dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/MEN/2011 tertanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan SK Bupati Magelang Nomor : 188.45/347/KEP/29/2011 tentang Lokasi Minapolitan Kabupaten Magelang. Dalam masterplan tersebut disebutkan pula bahwa pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Magelang berbasis pada perikanan budidaya ikan air tawar, hal ini didasarkan pada potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 108.575 Ha atau sekitar 9,56 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak $110^{\circ}01'51''$ – $110^{\circ}26'28''$ BT dan $7^{\circ}19'13''$ – $7^{\circ}42'6''$ LS melihat posisinya Kabupaten Magelang termasuk daerah beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Wilayah Kabupaten Magelang juga dilalui sungai–sungai besar, diantaranya sungai Elo dan Progo yang bisa dijadikan sumber air untuk usaha perikanan budidaya. Sedangkan secara hidrologis Kabupaten Magelang merupakan wilayah dataran tinggi berbentuk cawan dan terletak di tengah beberapa gunung sehingga merupakan wilayah yang memiliki sumber air yang melimpah.

Sesuai dengan konsep *blue economy* yang menekankan pada keberlanjutan, pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang juga diarahkan kepada pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan. Untuk lebih menjamin terlaksananya pengembangan kawasan yang

berkelanjutan, data dan informasi yang komprehensif terutama mengenai kondisi aspek ekologi, ekonomi, sosial, infrastruktur, hukum dan kelembagaan wilayah pengembangan kawasan sangatlah dibutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan diberbagai bidang, termasuk pengembangan kawasan minapolitan, keberlanjutan seharusnya sudah menjadi tujuan utama. Stagnasi pengembangan kawasan sering terjadi karena aspek-aspek pengembangan kawasan berkelanjutan lebih sering terabaikan. Pendulum pengembangan kawasan hanya bergerak pada salah satu aspek yakni aspek ekonomi. Hal ini sering menimbulkan permasalahan pengembangan kawasan berkelanjutan. Analisis lingkungan kawasan terutama pada dimensi–dimensi yang mempengaruhi keberlanjutan kawasan menjadi sebuah keharusan. Berkaitan dengan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian yang muncul dan untuk dicarikan pemecahan masalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang ditinjau dari sudut pandang aspek/dimensi ekologi, ekonomi, sosial, infrastuktur, serta hukum dan kelembagaan?.
2. Faktor/atribut sensitif apakah yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang?.
3. Kebijakan dan strategi apakah yang dapat dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Pada Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji status keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang berdasarkan besaran nilai indeks aspek/dimensi ekologi, ekonomi, sosial, infrastruktur serta hukum dan kelembagaan.

2. Mengkaji faktor/atribut sensitif yang berpengaruh terhadap besaran nilai indeks dan status keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang
3. Merumuskan prioritas kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari kajian mengenai pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, rujukan ataupun tambahan informasi bagi semua *stakeholder* pengembangan kawasan minapolitan dalam menentukan langkah dan strategi pengembangan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dengan dibentuknya kawasan minapolitan bisa tercapai dan keberlanjutannya tetap terjaga.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pengembangan kawasan minapolitan yang berbasis pada perikanan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Magelang hingga saat penelitian dilakukan baru sampai tahap perencanaan yakni tahap penyusunan Detail Engeneering Design (DED). Seperti disebutkan dalam masterplan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Magelang bahwa daerah pengembangan kawasan minapolitan berlokasi di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Muntilan.

Kecamatan Sawangan berpusat di Desa Mangunsari dengan Desa Butuh, Desa Gondowangi, Desa Sawangan, dan Desa Krogowan sebagai daerah pendukung. Kecamatan Mungkid, konsentersasi pengembangan kawasan berada di wilayah Desa Ngrajek dengan Desa Blondo, Desa Mungkid, Desa Pagersari, Desa Bojong, Desa Pabelan, Desa Mendut, Desa Rambeanak, Desa Paremono, dan Desa Ambartawang sebagai daerah pendukung. Kecamatan Muntilan, berpusat di Desa Menayu dengan daerah pendukungnya berlokasi di Desa Gondosuli, Desa Sedayu, Desa Muntilan, Desa Tamanagung, Desa Keji, Desa Adikarto, dan Desa Ngawen. Ketiga kecamatan tersebut merupakan lokasi penelitian. Adapun komoditas unggulannya adalah ikan Nila dan ikan Lele.

Usaha perikanan budidaya dijadikan sebagai basis pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Magelang dikarenakan secara agroklimat wilayah Kabupaten Magelang pada umumnya mempunyai perairan yang cocok untuk usaha perikanan budidaya.

1.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan studi pustaka diperoleh hasil bahwa penelitian mengenai keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan pernah dilakukan oleh Suryawati dan Purnomo (2011) yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal dengan judul Analisis Ex-Ante Keberlanjutan Program Minapolitan menggunakan dimensi ekologi, ekonomi, sosial–budaya, hukum dan kelembagaan, teknologi dan infrastruktur sebagai variabel pada Multi Dimensi Scalling (MDS) yang meliputi seluruh kabupaten dan kota yang tercakup dalam Kepmen KP Nomor: KEP.32/ MEN/2010 sehingga dapat divisualisasikan dalam sebuah model diagram layang (indeks) keberlanjutan program minapolitan.

Senada dengan penelitian Suryawati dan Purnomo (2011), pada tahun yang sama Laras BK, Marimin, Nurjaya IW, dan Budiharsono, S melakukan penelitian yang diberi judul Dimensi keberlanjutan Pengelolaan Kota Tepian Pantai (studi kasus Kota Semarang) yang telah dipublikasikan dalam jurnal forum pascasarjana Petroleum Industrial Consultan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu lokasi dan basis pengembangan kawasan. Dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan kebijakan dan strategi yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan.

